



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah
HUKUM DAN EKONOMI KEMARITIMAN

Program Studi
HUKUM BISNIS
Tahun Akademik 2024/2025

INSTITUT TEKNOLOGI & BISNIS MARITIM
BALIK DIWA

MAKASSAR - 2024

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	Hukum Bisnis
Nama Mata Kuliah	:	Hukum dan Ekonomi Kemaritiman
Kode Mata Kuliah	:	BD237420210WP3
Bobot SKS	:	3
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah Hukum dan Ekonomi Kemaritiman memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara aspek hukum dan aktivitas ekonomi di sektor kemaritiman sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Mata kuliah ini membahas konsep ekonomi maritim, kebijakan kemaritiman Indonesia, hukum laut nasional dan internasional, pengelolaan pelabuhan, pelayaran, logistik, perikanan, investasi maritim, perlindungan lingkungan laut, serta penyelesaian sengketa di bidang kemaritiman.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	1. S2-Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan tanggung jawab profesi. 2. S3-Menunjukkan sikap profesional, disiplin, adaptif, serta memiliki jiwa kewirausahaan dalam menghadapi perkembangan dunia usaha dan industri maritim 3. P1-Menguasai konsep, teori, asas, metodologi, dan sistem hukum Indonesia serta hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan kemaritiman. 4. P2-Menguasai prinsip-prinsip hukum bisnis, perdagangan, investasi, kontrak, dan regulasi yang berkaitan dengan sektor kemaritiman 5. KU2-Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis fakta, data, dan ketentuan hukum dalam sektor kemaritiman. 6. KU3-Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum secara lisan maupun tulisan sesuai kaidah akademik 7. KK1-Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum bisnis di sektor kemaritiman berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Semester	:	II (Dua)

Koordinator Mata : Dr. Nursyahrhan, S.Pi.,M.Si
Kuliah

Pengembang RPS : 1. A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si
/ Pengampu MK 2. Suprianto, S.Pd.,M.Si

Makassar, 2 Februari 2024

Pengembang RPS / Pengampu MK

Koordinator MK

A. Osfira Rosary,
S.E.,M.Si

Suprianto, S.Pd.,M.Si

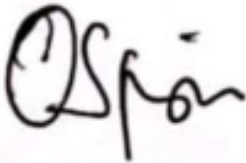
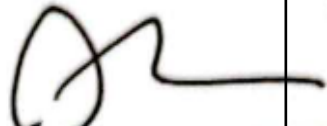
Dr. Nursyahrhan,
S.Pi.,M.Si

Mengetahui: Wakil Rektor I	Menyetujui: Ketua Program Studi
 Dr. Ir. Awaluddin, S.P.,M.Sc	 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH (MK)		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Revisi
Hukum dan Ekonomi Kemaritiman		BD237420210WP3	Hukum dan Ekonomi Kemaritiman	3	II	Makassar, 2 Februari 2024
OTORISASI Kepala LPMI  Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi.,M.Si		Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
		 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si		 Dr. Nursyahrhan, S.Pi.,M.Si		 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si
Capaian Pembelajaran n (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)					
	CPL-S2	Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan tanggung jawab profesi.				
	CPL-S3	Menunjukkan sikap profesional, disiplin, adaptif, serta memiliki jiwa kewirausahaan dalam menghadapi perkembangan dunia usaha dan industri maritim.				
	CPL-P1	Menguasai konsep, teori, asas, metodologi, dan sistem hukum Indonesia serta hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan kemaritiman.				
	CPL-P2	Menguasai prinsip-prinsip hukum bisnis, perdagangan, investasi, kontrak, dan regulasi yang berkaitan dengan sektor kemaritiman.				
	CPL-KU1	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan hukum dan ekonomi kemaritiman.				
	CPL-KU2	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis fakta, data, dan ketentuan hukum dalam sektor kemaritiman.				

	CPL-KU3	Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum secara lisan maupun tulisan sesuai kaidah akademik.
	CPL-KK1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum bisnis di sektor kemaritiman berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
	CPL-KK2	Mampu menyusun dokumen hukum, <i>legal opinion</i> , dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi kemaritiman.
	CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan pada Mata Kuliah)	
	CPMK-1	Mampu menjelaskan konsep dasar hukum dan ekonomi kemaritiman, kebijakan kemaritiman nasional, serta peran sektor maritim dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
	CPMK-2	Mampu menganalisis regulasi nasional dan internasional yang mengatur pelayaran, pelabuhan, perdagangan laut, perikanan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
	CPMK-3	Mampu menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan investasi, logistik, bisnis pelayaran, pengelolaan pelabuhan, dan perlindungan lingkungan laut.
	CPMK-4	Mampu mengevaluasi kebijakan hukum dan ekonomi kemaritiman dalam mendukung pembangunan ekonomi biru (<i>blue economy</i>) yang berkelanjutan.
	CPMK-5	Mampu menyusun <i>legal opinion</i> dan rekomendasi penyelesaian terhadap kasus hukum di bidang ekonomi kemaritiman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
	Sub-CPMK	
	CPMK-1	Menjelaskan konsep hukum dan ekonomi kemaritiman.
	CPMK-1	Menjelaskan kebijakan kemaritiman nasional dan konsep Poros Maritim Dunia.
	CPMK-1	Menjelaskan potensi ekonomi maritim Indonesia.
	CPMK-2	Menganalisis hukum laut nasional dan internasional dalam aktivitas ekonomi maritim.
	CPMK-2	Menganalisis regulasi pelayaran dan kepelabuhanan.
	CPMK-2	Menganalisis regulasi perikanan, logistik, dan perdagangan laut.
	CPMK-3	Menganalisis investasi dan bisnis di sektor kemaritiman.
	CPMK-3	Menganalisis perlindungan lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan.

	CPMK-3	Menganalisis penyelesaian sengketa hukum di bidang kemaritiman.
	CPMK-4	Mengevaluasi implementasi kebijakan ekonomi biru (<i>Blue Economy</i>) dalam pembangunan nasional.
	CPMK-4	Mengevaluasi peran hukum dalam mendukung investasi dan tata kelola kemaritiman.
	CPMK-5	Menyusun <i>legal opinion</i> terhadap kasus hukum ekonomi kemaritiman.
	CPMK-5	Menyusun rekomendasi kebijakan hukum untuk mendukung pembangunan sektor kemaritiman.
	CPMK-5	Mempresentasikan hasil analisis hukum dan ekonomi kemaritiman secara ilmiah.
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK		
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar hukum dan ekonomi kemaritiman. 2. Kebijakan kemaritiman Indonesia dan Poros Maritim Dunia. 3. Potensi ekonomi maritim Indonesia. 4. Hukum laut nasional dan internasional. 5. Regulasi pelayaran dan kepelabuhanan. 6. Hukum perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan. 7. Logistik maritim dan perdagangan internasional. 8. Investasi dan bisnis sektor kemaritiman. 9. Perlindungan lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan. 10. Ekonomi biru (Blue Economy). 11. Penyelesaian sengketa hukum kemaritiman. 12. Tata kelola pelabuhan dan kawasan ekonomi maritim. 13. Analisis kebijakan hukum kemaritiman. 14. Penyusunan legal opinion dan rekomendasi kebijakan.	

Daftar Pustaka	1. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional. 2. Boer Mauna, Hukum Internasional. 3. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. 4. Rochmani S. dan M. Firdaus, Ekonomi Maritim Indonesia. 5. Malcolm N. Shaw, International Law. 6. Adji Samekto, Hukum Laut Internasional. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 10. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 11. Dokumen kebijakan nasional mengenai Ekonomi Biru (Blue Economy) dan pembangunan kemaritiman Indonesia. 12. Dr. Nursyahrani, S.Pi., M.Si, Analisis Kesesuaian Perairan Rumput Laut (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) Di Perairan Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah Menggunakan Citra Sentinel-2A
-----------------------	--

1. Rencana Pembelajaran Semester

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan(%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Menjelaskan konsep hukum dan ekonomi kemaritiman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum dan ekonomi kemaritiman	Tes diagnostik, diskusi kelas		Interactive Lecture, Collaborative Learning	Pengantar Hukum dan Ekonomi Kemaritiman; ruang lingkup dan urgensi sektor kemaritiman	3

2	CPMK-1	Menjelaskan kebijakan kemaritiman nasional dan Poros Maritim Dunia	Mahasiswa mampu menjelaskan arah kebijakan kemaritiman Indonesia	Tugas individu		Small Group Discussion	Kebijakan Kelautan Indonesia, Poros Maritim Dunia, Ekonomi Biru (<i>Blue Economy</i>)	4
3	CPMK-1	Menjelaskan potensi ekonomi maritim Indonesia	Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi ekonomi sektor kemaritiman	Presentasi kelompok		Collaborative Learning	Potensi ekonomi kelautan, pelayaran, perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari	5
4	CPMK-2	Menganalisis hukum laut nasional dan internasional	Mahasiswa mampu menganalisis pengaturan hukum laut dalam kegiatan ekonomi maritim	Studi kasus		Case Method	Hukum Laut Nasional, UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia	5
5	CPMK-2	Menganalisis regulasi pelayaran dan kepelabuhanan	Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi pelayaran dan	Analisis regulasi		Problem Based Learning	Hukum Pelayaran, Kepelabuhanan,	5

			tata kelola pelabuhan				Keselamatan Pelayaran	
6	CPMK-2	Menganalisis regulasi perikanan dan logistik maritim	Mahasiswa mampu menganalisis regulasi pengelolaan sumber daya kelautan	Presentasi kelompok		Project Based Learning	Hukum Perikanan, Logistik Maritim, Rantai Pasok Maritim	5
7	CPMK-3	Menganalisis investasi dan bisnis sektor kemaritiman	Mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek hukum investasi maritim	Studi kasus		Case Method	Investasi Maritim, Kawasan Ekonomi Khusus, Industri Maritim	8
8	UTS	Evaluasi CPMK-1 s.d. CPMK-3	Mahasiswa mampu memahami konsep dan regulasi hukum kemaritiman	Ujian Tengah Semester		Evaluasi	Materi Pertemuan 1–7	15
9	CPMK-3	Menganalisis perlindungan lingkungan laut	Mahasiswa mampu menganalisis perlindungan lingkungan laut dalam	Tugas individu		Problem Based Learning	Pencemaran Laut, Perlindungan Ekosistem Laut, Tanggung	5

			perspektif hukum				Jawab Lingkungan	
10	CPMK-3	Menganalisis penyelesaian sengketa hukum kemaritiman	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa maritim	Analisis kasus		Case Method	Sengketa Maritim Nasional dan Internasional	5
11	CPMK-4	Mengevaluasi implementasi Blue Economy	Mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia	Presentasi kelompok		Project Based Learning	Blue Economy dan Pembangunan Berkelanjutan	5
12	CPMK-4	Mengevaluasi tata kelola ekonomi kemaritiman	Mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan hukum dan ekonomi sektor maritim	Diskusi panel		Collaborative Learning	Tata Kelola Pelabuhan, Tata Kelola Sumber Daya Kelautan	5
13	CPMK-5	Menyusun <i>Legal Opinion</i> terhadap kasus hukum kemaritiman	Mahasiswa mampu menyusun analisis hukum terhadap kasus nyata	Penugasan individu		Case Method	Penyusunan <i>Legal Opinion</i>	5

14	CPMK-5	Menyusun rekomendasi kebijakan hukum kemaritiman	Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan berbasis analisis hukum	Project		Project Based Learning	Policy Brief dan Rekomendasi Kebijakan	5
15	CPMK-5	Mempresentasikan hasil analisis hukum dan ekonomi kemaritiman	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis secara ilmiah	Seminar		Seminar Project	Seminar Hasil Project	5
16	UAS	Evaluasi seluruh CPMK	Mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh kompetensi yang telah diperoleh	Ujian Akhir Semester dan Presentasi Proyek		Evaluasi	Materi Pertemuan 1–15	15

2. Rancangan Tugas dan Latihan

CPMK	Nama Tugas	Sub-CPMK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CPMK-1	Tugas Individu 1: Analisis Konsep	Menjelaskan konsep dasar hukum dan	Individu	Konsep hukum kemaritiman, ekonomi	Studi literatur, analisis referensi, dan	Minggu ke-2	Esai ilmiah (1.500–2.000 kata) mengenai

	Hukum dan Ekonomi Kemaritiman	ekonomi kemaritiman serta kebijakan kemaritiman nasional		maritim, Poros Maritim Dunia, Blue Economy	penulisan esai ilmiah		konsep hukum dan ekonomi kemaritiman
CPMK- 1	Presentasi Kelompok: Potensi Ekonomi Maritim Indonesia	Menjelaskan potensi ekonomi maritim Indonesia	Kelompok	Sektor pelayaran, pelabuhan, perikanan, logistik, pariwisata bahari, industri maritim	Studi pustaka, pengumpulan data, penyusunan slide, dan presentasi	Minggu ke-3	Slide presentasi, laporan kelompok, dan infografis potensi ekonomi maritim
CPMK- 2	Case Method 1: Analisis Regulasi Hukum Kemaritiman	Menganalisis hukum laut nasional dan internasional serta regulasi pelayaran dan kepelabuhanan	Kelompok	UNCLOS 1982, UU Pelayaran, UU Kelautan, regulasi kepelabuhanan	Analisis peraturan perundang-un- dangan dan studi kasus, dilanjutkan diskusi kelompok	Minggu ke-6	<i>Case Brief</i> dan <i>Legal Review</i> mengenai implementasi regulasi kemaritiman
CPMK- 3	Case Method 2: Analisis Sengketa Hukum Kemaritiman	Menganalisis investasi, bisnis kemaritiman, dan penyelesaian sengketa	Kelompok	Sengketa pelayaran, investasi pelabuhan, Illegal Fishing, pencemaran laut, sengketa wilayah laut	Analisis putusan, artikel ilmiah, dan regulasi terkait, kemudian dipresentasikan	Minggu ke-10	<i>Case Brief</i> , <i>Legal Opinion</i> , dan presentasi hasil analisis

CPMK-4	Project: Analisis Kebijakan Blue Economy	Mengevaluasi implementasi kebijakan ekonomi biru (<i>Blue Economy</i>)	Kelompok	Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan	<i>Project Based Learning</i> , analisis kebijakan, observasi data, penyusunan laporan	Minggu ke-12	Makalah ilmiah dan <i>Policy Brief</i> mengenai implementasi <i>Blue Economy</i>
CPMK-5	Legal Opinion: Kasus Hukum dan Ekonomi Kemaritiman	Menyusun <i>Legal Opinion</i> terhadap kasus hukum kemaritiman	Individu	Analisis kasus hukum di bidang pelayaran, pelabuhan, perdagangan laut, atau investasi maritim	Analisis yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan	Minggu ke-14	Dokumen <i>Legal Opinion</i> yang sistematis dan argumentatif
CPMK-5	Seminar Hasil Proyek	Menyusun rekomendasi kebijakan dan mempresentasikan hasil analisis	Kelompok	Rekomendasi kebijakan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi kemaritiman	Penyusunan laporan akhir, seminar, dan presentasi di hadapan dosen dan mahasiswa	Minggu ke-15	Laporan akhir proyek, <i>Policy Recommendation</i> , slide presentasi, dan artikel ilmiah sederhana

Tabel Hubungan CPMK/Sub-CPMK dengan SDGs

No.	CPMK	Sub-CPMK	SDGs Yang Tekait
1	CPMK-1	Menjelaskan konsep hukum dan ekonomi kemaritiman	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 14 – Ekosistem Lautan

2	CPMK-1	Menjelaskan kebijakan kemaritiman nasional dan konsep Poros Maritim Dunia	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 14 – Ekosistem Lautan; SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3	CPMK-1	Menjelaskan potensi ekonomi maritim Indonesia	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
4	CPMK-2	Menganalisis hukum laut nasional dan internasional dalam aktivitas ekonomi maritim	SDG 14 – Ekosistem Lautan; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
5	CPMK-2	Menganalisis regulasi pelayaran dan kepelabuhanan	SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
6	CPMK-2	Menganalisis regulasi perikanan, logistik, dan perdagangan laut	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; SDG 14 – Ekosistem Lautan
7	CPMK-3	Menganalisis investasi dan bisnis di sektor kemaritiman	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
8	CPMK-3	Menganalisis perlindungan lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan	SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim; SDG 14 – Ekosistem Lautan
9	CPMK-3	Menganalisis penyelesaian sengketa hukum di bidang kemaritiman	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
10	CPMK-4	Mengevaluasi implementasi kebijakan <i>Blue Economy</i> dalam pembangunan nasional	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim; SDG 14 – Ekosistem Lautan
11	CPMK-4	Mengevaluasi peran hukum dalam mendukung investasi dan tata kelola kemaritiman	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
12	CPMK-5	Menyusun <i>Legal Opinion</i> terhadap kasus hukum ekonomi kemaritiman	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
13	CPMK-1	Menjelaskan konsep hukum dan ekonomi kemaritiman	SDG 4 – Pendidikan Berkualitas; SDG 14 – Ekosistem Lautan

14	CPMK-1	Menjelaskan kebijakan kemaritiman nasional dan konsep Poros Maritim Dunia	SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG 14 – Ekosistem Lautan; SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
----	--------	---	--

RENCANA EVALUASI

No	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Deskripsi	Bobot (%)
1	Aktivitas Partisipatif			50
2	Hasil Proyek			10
3	Kognitif/Pengetahuan	Tugas		10
4	Kognitif/Pengetahuan	Kuis		10
5	Kognitif/Pengetahuan	UTS		10
6	Kognitif/Pengetahuan	UAS		10

